

ALTAMKIN Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Journal website: <https://altamkin.al-anwar.id/index.php/i/index>

ISSN: 3089-3895 (Online)
<https://doi.org/10.61166/altamkin.v1i2.8>

Vol. 1 No. 2 (2025)
pp. 47-56

Research Article

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2016

Eki Dwi Nur Nindasari¹, Dini Khofifah Sari², Nofita Umami³, Chamdan Purnama⁴

1. Prodi S1 Manajemen, STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
2. Prodi S1 Manajemen, STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
3. Prodi S1 Manajemen, STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
4. STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia

Correspondent: ekidwi52@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 15, 2025
Accepted : May 15, 2025

Revised : May 01, 2025
Available online : July 01, 2025

How to Cite: Nindasari, E., Umami, N., Sari, D. K., & Purnama, C. (2025). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2016. *ALTAMKIN: Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 47-56. <https://doi.org/10.61166/altamkin.v1i2.8>

Abstrak.

Penelitian ini menguji dampak dari penerapan upah minimum terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia menggunakan data panel ketenagakerjaan dari tahun 2011-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur untuk mengetahui Dampak upah minimum sebagai variabel eksogen terhadap pengangguran dan kemiskinan sebagai variabel endogen. Dalam penelitian ini juga di gunakan variabel intervening yaitu rata-rata upah pekerja. hasil dari penelitian ini menunjukan bahawa peningkatan upah minimum mempengaruhi secara positif rata-rata upah pekerja, melalui rata-rata upah pekerja upah minimum mempengaruhi terhadap tingkat pengangguran dengan upah minimum yang meningkat maka tingkat pengangguran ikut meningkat. Upah minimum juga memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah, dimana tingkat kemiskinan ikut berkurang seiring meningkatnya rata-rata upah pekerja, namun peningkatan pengangguran akibat dari upah minimum yang meningkat juga memberikan pengaruh pada bertambahnya tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Upah Minimum, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, dimana negara ini memiliki sumber daya alam yang kaya dan memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Selain itu, luas wilayah yang sangat luas terdiri dari beribu-ribu pulau baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Indonesia memiliki lima pulau besar sebagai pulau utama diantaranya: Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Dan Papua, dari kelima pulau besar tersebut bisa dikatakan pulau Jawa merupakan pusat bagi aktifitas perekonomian (Purnama, 2014).

Sebagai salah satu sumber daya dalam proses pembangunan, bisa dikatakan sumber daya manusia merupakan sumber daya kunci, jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang melimpah tentu dengan dibarengi dengan kualitas yang baik akan membuat mereka mampu memaksimalkan sumber daya yang lainnya dengan baik. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia tentu hal ini menjadikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah untuk proses pembangunan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-empat terbesar di dunia (Syaipudin, 2023).

Jumlah penduduk yang melimpah ini merupakan modal yang besar untuk pembangunan ekonomi, dengan jumlah penduduk yang besar hal ini akan menjadi jaminan bagi proses produksi. Jumlah angkatan kerja yang melimpah tersebut merupakan salah satu mesin bagi pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan tenaga kerja bagi proses produksi, melalui produktifitas mereka akan menghasilkan barang dan jasa untuk konsumen, sementara mereka yang menghasilkan barang dan jasa akan mendapatkan imbalan berupa laba bagi pengusaha dan upah bagi pekerja. Jumlah yang besar tersebut akan memberikan kontribusi yang besar dengan syarat angkatan kerja tersebut memiliki klasifikasi yang baik sehingga memiliki produktifitas yang baik (Rahmah et al., 2022). Jika penduduk yang besar tersebut tidak memiliki klasifikasi yang baik maka sebagian dari mereka tidak bisa diserap oleh pasar sehingga menimbulkan pengangguran. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut Simanjuntak (1985) tenaga kerja adalah penduduk yang sudah bekerja, sedang bekerja, atau yang sedang melakukan pekerjaan. Termasuk di dalamnya penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, semuanya masuk dalam arti tenaga kerja, karena pada suatu waktu mereka dapat bekerja. Produktifitas tenaga kerja yang diberikan kepada perusahaan berupa produksi barang dan jasa, maka produktifitas tersebut haruslah mendapat imbalan berupa upah yang diberikan berdasarkan kepada produktifitas tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa. Dengan upah tersebut maka tenaga kerja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan

keluarganya. Namun, banyak kasus memperlihatkan bahwa upah yang diberikan tidak sesuai dengan produktifitas yang diberikan, atau upah yang diberikan tidak terlalu rendah dari kebutuhan hidup mereka.

Perusahaan mengeluarkan imbalan berupa upah terhadap tenaga kerja yang mereka miliki berdasarkan produktifitas dan keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu saat jumlah penawaran jasa tenaga kerja lebih banyak dari pada permintaannya akan membuat perusahaan memberikan upah yang rendah. Namun, banyak pengamat yang menilai bahwa upah yang diberikan terhadap pekerja masih dibawah dari produktifitas yang diberikan dan juga upah yang diberikan sangat rendah (Yasin & Irwan, 2020). Melihat kenyataan bahwa upah yang diterima oleh pekerja lebih rendah dari upah seharusnya, maka diusulkan kebijakan upah minimum.

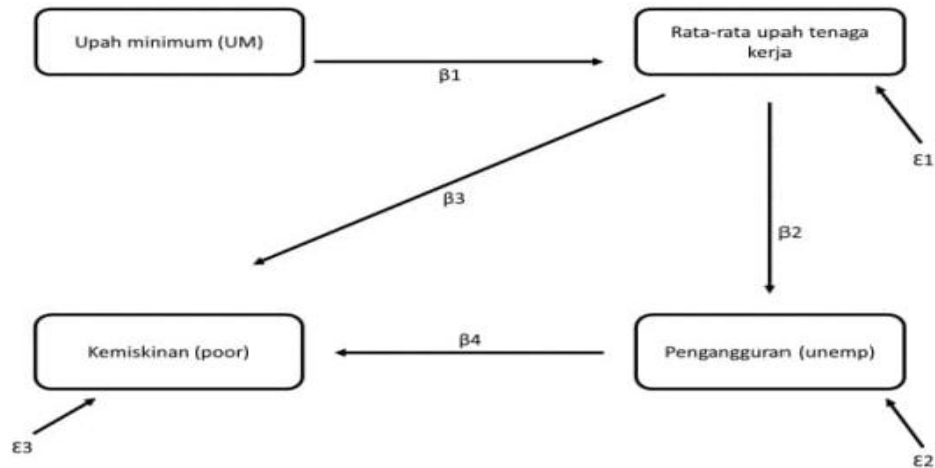
Kebijakan ini ditunjukan untuk membantu pekerja dengan gaji rendah, para tenaga kerja muda, mengurangi kesenjangan pendapatan dan alat untuk memerangi kemiskinan. Pernyataan inilah yang mendasari di promosikannya upah minimum oleh para penentangannya Kebijakan upah minimum sendiri tidak bearti diterima secara menyeluruh. Beberapa akademisi dan praktisi mempertanyak keefektifan kebijakan upah minimum ini baik terhadap pengaruhnya pada tingkat upah maupun terhadap kondisi pasar tenaga kerja (Linggawati & Wanadewa, 2022).

Penerapan kebijakan upah minimum di indonesia sendiri di terapkan agar menjadi batas minimum bagi perusahaan dalam memberikan upah terhadap pekerja. kebijakan ini ditunjukan untuk membantu tenaga kerja yang berada dalam jebakan kemiskinan. Diharapkan dengan upah yang meningkat setiap tahun sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan berbagai pertimbangan lainnya ikut meningkat sehingga nominal upah terus disesuaikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis yang telah diajukan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur. Dimana, analisis jalur ini ditujukan agar bisa diketahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari kebijakan upah minimum terhadap pengangguran dan kemiskinan. Kemudian melihat variabel-variabel moderating yang menjadi perantara bagi hubungan antara kebijakan upah minimum terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Gambar 1. Diagram analisis jalur pengaruh upah minimum terhadap pengangguran dan kemiskinan



Gambar di atas menunjukkan diagram analisis jalur yang menggambarkan pengaruh upah minimum terhadap pengangguran dan kemiskinan. Dalam diagram ini, upah minimum (UM) memengaruhi rata-rata upah tenaga kerja melalui jalur koefisien β_1 . Selanjutnya, rata-rata upah tenaga kerja memengaruhi tingkat pengangguran (unemp) melalui jalur β_2 . Selain itu, upah minimum juga secara langsung memengaruhi tingkat kemiskinan (poor) melalui jalur β_3 . Tingkat pengangguran kemudian memengaruhi tingkat kemiskinan melalui jalur β_4 . Diagram ini juga menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh tak terukur yang dilambangkan dengan ϵ_1 , ϵ_2 , dan ϵ_3 pada masing-masing variabel endogen, yaitu rata-rata upah tenaga kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Secara keseluruhan, model ini berusaha menjelaskan bagaimana kebijakan upah minimum dapat berdampak tidak langsung maupun langsung terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

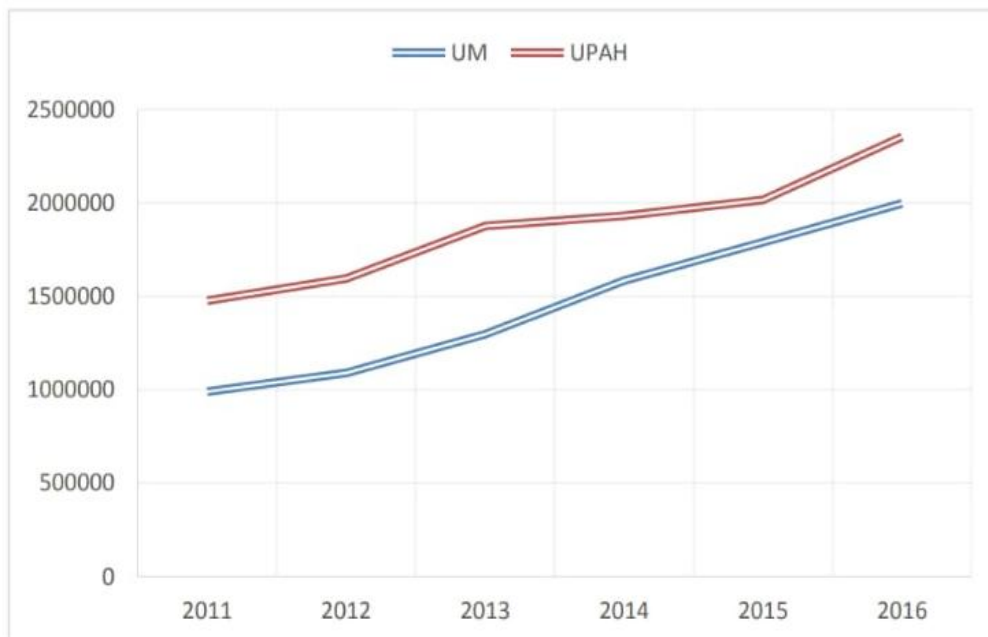
Pengangguran dalam penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka, artinya menggunakan rasio antar angkatan kerja total dengan angkatan kerja yang bekerja, hal ini menunjukkan seberapa besar pasar tenaga kerja di Indonesia mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Bila tingkat pengangguran terbukanya rendah maka hal ini menjadi sesuatu yang baik karena dengan begitu banyak dari angkatan kerja yang tersedia mampu untuk masuk dan diserap oleh pasar tenaga kerja. Indonesia dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat menyimpan berbagai potensi ekonomi, karena jumlah angkatan kerja yang besar akan membuat ketersediaan tenaga kerja menjadi melimpah.

Ketersediaan tenaga kerja tersebut akan mampu mendorong perekonomian melaju lebih cepat dengan menciptakan barang dan jasa dengan lebih cepat. Perusahaan juga tidak perlu takut kekurangan faktor produksi mereka karena ketersediaan tenaga kerja tersebut (Syaipudin & Awwalin, 2023). Angkatan kerja yang besar bagaikan pedang bermata dua, disatu sisi mereka menyimpan potensi yang besar untuk kepentingan ekonomi nasional melalui penciptaan barang dan jasa, namun saat angkatan kerja tersebut tidak memiliki cukup keahlian justru akan mengakibatkan pengangguran yang cukup kronis, akibat angkatan kerja yang tersedia tidak dibutuhkan oleh pasar. Melihat data yang ada menunjukkan bagaimana kualitas tenaga kerja di Indonesia cukup memprihatinkan, lebih dari 60% angkatan kerja kita masuk dalam kategori angkatan kerja tidak terdidik. Sehingga hal ini cukup mengkhawatirkan karena jumlah angkatan kerja kita terus meningkat setiap tahunnya tetapi kualitas mereka tidak meningkat.

Ketersediaan tenaga kerja yang besar membuat perusahaan bisa leluasa untuk melakukan aktifitas ekonominya. Sehingga mereka bisa menentukan upah sesuai kehendak mereka. Perusahaan akan menggaji pegawai sesuai dengan produktifitas mereka menurut teori pasar persaingan terbuka. Namun, dalam prakteknya perusahaan yang hanya berjumlah sedikit mampu mengontrol harga tenaga kerjanya. Terutama pada negara dimana jumlah penduduknya besar dengan angkatan kerja yang akan menjadi tenaga kerjanya melimpah seperti di Indonesia.

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menentukan harga dari tenaga kerjanya membuat pasar tenaga kerja tidak lagi menjadi bersifat persaingan sempurna, namun sudah berubah menjadi pasar monopsoni. Saat perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga tenaga kerjanya maka disitulah mereka akan menekan harga tenaga kerjanya apalagi jumlah tenaga kerja yang tersedia melimpah. Oleh karena itu, pemerintah mempromosikan kebijakan upah minimum untuk melindungi tenaga kerja dari upah yang tidak layak.

Gambar 2. Diagram perubahan dan rata-rata UMK di Indonesia tahun 2011-2016



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan Upah Minimum (UM) dan UPAH dari tahun 2011 hingga 2016. Secara umum, baik UM maupun UPAH mengalami peningkatan setiap tahunnya. UM (garis biru) memulai dari angka sekitar 1 juta rupiah pada tahun 2011 dan meningkat konsisten hingga mendekati 2 juta rupiah pada tahun 2016. Sementara itu, UPAH (garis merah) selalu berada di atas UM, dimulai dari sekitar 1,5 juta rupiah pada 2011 dan meningkat hingga lebih dari 2,5 juta rupiah pada 2016. Kenaikan yang signifikan tampak terjadi antara tahun 2015 ke 2016 untuk kedua variabel tersebut, yang mengindikasikan adanya lonjakan dalam kebijakan pengupahan pada periode tersebut. Grafik ini menggambarkan tren positif dalam peningkatan pendapatan pekerja selama enam tahun terakhir.

Gambar 3. Grafik jumlah pekerja di Indonesia tahun 2011-2016 dalam jutaan rupiah



Menurut data dari kementerian tenaga kerja, selama tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang terkena phk semakin bertambahnya waktu terus memiliki ternd yang meningkat terutama periode 2013-2016. Pada tahun 2011 tercatat ada sebanyak 17.106 pekerja yang terkena PHK, jumlah ini turun untuk tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 7.465 dan 6.376, pada tahun tingkat phk di indonesia mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 2014 terdapat 48.800 pekerja terkena PHK, pada tahun 2015 jumlah ini terus mengalami peningkatan menjadi 77. 710 pekerja, data pada kuartal-1 tahun 2016 versi pemerintah sudah terdapat sekitar 7.954.

Berdasarkan data tersebut tercatat bahwa peningkatan jumlah pekerja ang di PHK, jumlah tersebut termasuk salah satu imbas dari meningkatnya upah minimum, selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian juga turut menyumbang banyak dalam terjadinya PHK tersebut, kombinasi dari kondisi ekonomi yang melemah dan tingginya nilai upah minimum membuat perusahaan melakukan penyesuain biaya dengan melakukan PHK terhadap pekerja yang mereka miliki.

Pengaruh upah minimum secara tidak langsung mempengaruhi variabel pengangguran sebesar 0,0128 dan signifikan pada level 10%. Hal ini menunjukkan bahwa saat upah minimum meningkat maka jumlah pengangguran terbuka ikut meningkat. Namun apabila kita meilihat R-squared pada persamaan kedua ini maka akan ditemukan R-squared yang rendah hanya sekita 1,6 persen keragaman dari tingkat pengangguran yang bisa dijelaskan dalam model tersebut Pada gambar dibawah ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka selama 6 tahun terakhir, dimana TPT berada stagnan pada tahun 2012-2014 sebelum meningkat pada tahun 2015 dan menurun lagi pada tahun 2016. Pada tabel 4. telah ditunjukan pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel dalam penelitian. Pengaruh upah

minimum terhadap pengangguran bersifat tidak langsung melalui variabel rata-rata upah.

Pengaruh yang tidak begitu besar dari variabel upah terhadap pengangguran dikarenakan terdapat variabel penjelas lainnya yang bisa menjelaskan variabel tingkat pengangguran terbuka, seperti variabel tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori two-sector model menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum akan membat peningkatan pada rata-rata upah pada sektor formal dan kemudia akan mengurangi jumlah pekerja pada sektor formal, pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal berpindah menuju sektor informal. di indonesai sendiri masih terdapat banyak pekerja yang bekerja pada sektor informal sehingga pengaruh upah minimum walaupun berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran tapi pengaruhnya relatif kecil dibandingkan variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

Hasil ini menunjukan bagaimana upah minimum meningkat dan memberikan dampak positif terhadap pengangguran (pengangguran juga ikut meningkat) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Analiz, Gindling, Dan Terrel (2011). Dimana, dalam penelitian mereka pun dikemukakan bahwa kebijakan upah minimum membuat pengurangan rekrutment oleh perusahaan dan meningkatkan tingkat PHK.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Peningkatan rata-rata upah akibat dari meningkatnya upah minimum mampu mengurangi jumlah kemiskinan, yang berarti apabila rata-rata upah meningkat maka tingkat kemiskinan akan berkurang hal ini terjadi karena peningkatan upah akan meningkatkan pendapatan bagi pekerja sehingga akan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan kesejahteraan mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alaniz, Gindling, Dan Terrel (2011) yang menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum mampu meningkatkan rata-rata upah pekerja sehingga meningkatkan pendapatan pekerja terutama pekerja dengan upah yang rendah.

Maka dari itu hasil ini menunjukan hasil yang sama, dimana upah minimum mampu meningkatkan rata-rata upah bagi pekerja karena peningkatan tersebut akan membuat pendapatan pekerja terutama pekerja dengan tingkat upah yang rendah meningkat dan mampu mendorong merek agar bisa memenuhi kebutuhan hidup layak mereka (Syaipudin & Luthfi, 2025). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, tercatat adanya penurunan jumlah penduduk miskin, tercatat pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin berkisar pada 30.018.930 juta jiwa, kemudian pada tahun berikutnya 2012 jumlah ini menurun jadi 28.314 100 juta jiwa, pada tahun 2013 jumlah tersebut sedikit meningkat ke 28.553.950 jta jiwa, pada tahun 2014 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 26.727.010, pada tahun 2015 angka tersebut kembali turun menjadi 23.872.190 juta jiwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia periode 2011-2016 menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Kebijakan upah minimum di Indonesia memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan rata-rata upah pekerja. upah minimum meningkat membuat rata-rata upah pekerja meningkat hal ini dikarenakan peningkatan upah bukan hanya terjadi kepada pekerja yang baru masuk tetapi juga berpengaruh kepada seluruh pekerja yang sudah bekerja, sehingga rata-rata upah pekerja meningkat.

Kedua, Peningkatan rata-rata upah pekerja membuat perusahaan mengurangi jumlah pekerja mereka dan mengurangi perekrutan terhadap tenaga kerja baru. Hal tersebut dilakukan oleh pengusaha karena dengan upah yang meningkat maka komponen biaya mereka akan meningkat terlebih melihat dari

kualitas tenaga kerja di Indonesia sebagian besar merupakan lulusan SD dan SMP, sehingga dengan upah yang besar perusahaan tidak mau untuk mengeluarkan upah yang besar bagi pekerja dengan kualifikasi tersebut. Ketiga, Melalui analisis jalur juga ditemukan bahwa upah minimum mempengaruhi tingkat pengangguran ini melalui variabel intervening yaitu rata-rata upah. Melalui variabel rata-rata upah tersebut upah minimum mempengaruhi tingkat pengangguran, hubungan variabel upah minimum dengan pengangguran bersifat positif, artinya apabila upah minimum meningkat maka pengangguran pun akan meningkat. Keempat, Upah minimum mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui variabel rata-rata upah dan juga pengangguran. Pengaruh upah minimum yang meningkatkan rata-rata upah pekerja telah membantu pekerja hal ini mengakibatkan jumlah penduduk miskin menjadi berkurang. Tapi bertambahnya, jumlah pengangguran membuat jumlah penduduk miskin juga meningkat karena hilangnya pendapatan mereka akibat dari kehilangan pekerjaan.

REFERENSI

- Alfian, N. (2018). Pengaruh citra merek, kualitas produk dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian mie instan (studi pada konsumen produk Mie Sedaap di Yogyakarta). [Skripsi tidak diterbitkan].
- Alma, B. (2011). Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa. Bandung: Alfabeta.
- Ari Yusandy, R. P. (2010). Analisis kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Mie Sedaap (Studi kasus pada Indomaret cabang Gedangan Sidoarjo). [Skripsi tidak diterbitkan].
- Bismala, L. (2012). Manajemen produksi operasi. Medan: Perdana Publishing.
- Digdowiseiso, K. (2017). Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis. Jakarta: LPU-UNAS.

- Firmansyah, A. M. (2018). Prilaku konsumen (sikap dan pemasaran). Yogyakarta: Deepublish.
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (Cet. 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, U. (2008). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indri Hastuti, L. (2002). Manajemen pemasaran: Jilid 1 (Edisi Milenium). Jakarta: Prehallindo.
- Indri Hastuti, L. (2005). Manajemen pemasaran: Jilid 1 dan 2. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Indri Hastuti, L. (2005). Manajemen pemasaran: Jilid II (Edisi kesebelas, alih bahasa Benyamin Molan). Jakarta: Indeks.
- Indri Hastuti, L. (2014). Analisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian kartu Simpati di Yogyakarta. [Skripsi tidak diterbitkan].
- Linggawati, N. W., & Wenagama, I. W. (2022). Pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat upah terhadap jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 400.
- Purnama, C. (2014). Improved performance through empowerment of small industry. *Journal of Social Economics Research*, 1(4), 72–86.
- Rahmah, Z. Z., Rahmah, Y., Purnama, C., Fatmah, D., & Rahmah, M. (2022). Strategi peningkatan pemasaran melalui media sosial terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 141–152.
- Supranto, J., & Limakrisna, N. (2011). Perilaku konsumen dan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syaipudin, L. (2023). Contribution of young entrepreneurs in building the creative economy of village communities. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(1), 80–98.
- Syaipudin, L., & Awwalin, I. N. (2023). Analysis traditional market revitalization for economic improvement of Kras Market Kediri. *MAR-Ekonomi: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(02), 32–41.
- Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2025). Pengaruh financing to debt ratio dan net profit margin terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2013–2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan*, 1(1), 10–21.
- Yasin, M., & Irwan, M. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 6(2), 134–164.